

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN:
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Muthia Harnida

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

ABSTRACT

This research is to investigate the effect of corporate governance mechanism which proxied by the managerial ownership, institutional ownership, the existence of proportion of independent commissioner and audit committee on the timeliness of submission of financial statement. The research sample is manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange for the period of 2012-2013 with 82 observations. The hypothesis testing is to examine the effects of managerial ownership, institutional ownership, independent commissioner, and the existence of audit committee used the multiple regression analysis. The results indicate that managerial ownership and institutional ownership have significant effect on the timeliness of submission of the financial statement while the existence of independent commissioner and audit committee have no significant effect on the timeliness of submission of financial statement.

Keywords: timeliness, financial statement, ownership and corporate governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keberadaan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode pengamatan 2012 dan 2013 dengan 82 observasi. Pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan keberadaan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Kata kunci: ketepatan waktu, laporan keuangan, kepemilikan, *corporate governance*

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan menurut SFAC No.1 memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang bisnis dan ekonomi serta memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang dikandungnya sehingga keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil. Menurut Kenley dan Stubus (1972) seperti dikutip Saleh (2004), ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Dyer dan McHugh (1975) juga menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien terhadap pasar saham untuk fungsi evaluasi dan penetapan harga (*pricing*) serta membantu mengurangi tingkat *insider trading*, kebocoran dan rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah, 2000).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Peningkatan jumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati karena ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu pencerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan.

Peraturan tentang perusahaan publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Peraturan Ketua Bapepam No. Kep 36/PM/2003 Tanggal 30 September 2003, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Emiten atau perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.

Penelitian ini menguji mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan keberadaan komisaris independen dan komite audit.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. TEORI KEAGENAN

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Dalam teori keagenan juga dijelaskan bahwa antara agen dan prinsipal terdapat berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan yang disebabkan oleh hubungan keagenan (*agency relationship*).

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa baik pemegang saham maupun agen akan memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing sehingga manajer bisa bertindak demi kepentingannya saja demikian juga sebaliknya pemegang saham dapat bertindak demi keuntungannya sendiri. Pihak prinsipal dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan kos pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah *moral hazard* dari agen. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan tersebut akan menimbulkan kos keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh pihak prinsipal maupun agen.

Menurut Jensen dan Meckling, kos keagenan meliputi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah kos yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, seperti biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer. *Bonding cost* adalah kos yang ditanggung agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal, seperti kos yang dikeluarkan untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham dan *residual loss* adalah kos yang timbul karena tindakan agen yang kadangkala berbeda dengan tindakan untuk kepentingan prinsipal.

Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh principal.

2. HUBUNGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Menurut Jensen dan Meckling (1976) konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham atau prinsipal dapat dikurangi dengan salah satu cara yakni dengan adanya kepemilikan manajerial. Apabila konflik kepentingan dapat dikurangi maka asimetri informasi (ketidaksimetrian informasi) akan berkurang dan tindakan manajer yang menyembunyikan informasi atau menunda informasi yang akan disampaikan ke publik tentu juga akan berkurang karena tidak ada alasan bagi pihak manajer untuk menyembunyikan atau menundanya meskipun informasi tersebut mengandung berita buruk (*bad news*). Dalam beberapa hasil penelitian dikemukakan bahwa faktor yang menyebabkan perusahaan terlambat atau menunda penyerahan laporan keuangannya adalah karena berita buruk yang dialami oleh perusahaan, namun apabila perusahaan mengalami berita baik (*good news*) perusahaan justru menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang maksimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka pihak manajemen diharapkan bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya guna memperoleh profit dan

kinerja yang diinginkan. Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya. Dengan demikian perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial diduga lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Dari uraian tersebut dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN LAPORAN KEUANGAN

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Investor institusional berbeda dengan investor individual. Menurut Shleifer dan Vishny (1986) seperti yang dikutip oleh Tong dan Ning (2004) menyatakan bahwa kepemilikan institusional lebih sukses dalam memonitor kinerja pihak manajemen. Pound (1988) juga mengemukakan seperti dikutip oleh Chiang dan Chia (2005) dalam *efficient monitoring hypothesis* yang dikembangkannya menyatakan bahwa pemegang saham institusional lebih profesional dari pemegang saham biasa sehingga kos monitoring perusahaan akan lebih rendah dan lebih efektif karena pemegang saham insitusional dapat mengurangi kos keagenan. Dalam *strategy alignment hypothesis* yang dikembangkannya, Pound (1988) juga menyatakan kemungkinan terdapatnya hubungan bisnis antara pemegang saham institusi dengan perusahaan sehingga dengan adanya hubungan tersebut dapat menyelaraskan tingkat kepentingan masing-masing pihak sehingga dapat meningkatkan keefektifan operasi perusahaan.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak insitusi tentu lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat sehingga dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih segera untuk menghindari berkurangnya relevansi dari informasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ang (1997), kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan monitoring bagi perusahaan dan dengan adanya monitoring yang efektif dari pihak institusi ini maka pihak manajemen tentu akan terdorong untuk bekerja dengan lebih baik untuk menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan insitusional diduga dapat meningkatkan kesegeraan perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangannya atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi sehingga semakin tinggi atau semakin besar kepemilikan

instutusional diduga perusahaan akan semakin segera menyerahkan laporan keuangannya. Dengan demikian dapat dikembangkan sebuah hipotesis yakni: H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penyampaian laporan keuangan.

4. HUBUNGAN KEBERADAAN KOMISARIS INDEPENDEN DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Menurut Fama (1980), Fama dan Jensen (1983), keberadaan komisaris independen merupakan hal yang penting untuk melakukan monitoring terhadap manajemen. Beasley (1996) meneliti tentang hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan laporan keuangan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan mempunyai persentase dewan komisaris eksternal yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Chtourou, dkk (2001) juga mengemukakan bahwa karakteristik dewan komisaris juga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya berfungsi melakukan monitoring terhadap keefektifan praktik pengelolaan korporasi yang baik (*good corporate governance*) yang diterapkan perusahaan. Sebagai wujud penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta diwajibkan memiliki komisaris independen sesuai dengan Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang ketentuan umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yakni ketentuan tentang keberadaan komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

Fama dan Jensen (1983) mengemukakan argumen bahwa dengan semakin besar proporsi komisaris independen pada dewan komisaris maka akan semakin efektif peranan komisaris independen di dalam pelaksanaan fungsi monitoringnya terhadap perilaku oportunistik manajemen.

Dahya (2002) dalam penelitiannya menguji tentang hubungan antara tingkat perputaran CEO dan kinerja perusahaan seiring dengan dikeluarkannya *Code of Best Practice in 1992* oleh *Cadbury Committee*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada sensitivitas *turnover* manajemen terhadap kinerja perusahaan dengan mengadopsi *Code of Best Practice* tersebut. Peningkatan dalam sensitivitas *turnover* manajemen tersebut disebabkan oleh meningkatnya anggota komisaris independen yang cenderung membuat keputusan yang konsisten dengan peningkatan kesejahteraan pemegang saham.

Keberadaan komisaris independen sebagai alat pengendalian internal akan mengurangi kos keagenan, meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi manfaat penahanan informasi sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen juga berfungsi meningkatkan monitoring terhadap pihak perusahaan agar bekerja lebih baik dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya untuk memperbaiki kualitas informasi akuntansi yang disajikan. Keberadaan komisaris independen diduga juga menentukan perusahaan untuk menyampaikan

laporan keuangannya tepat waktu sehingga dapat dikembangkan sebuah hipotesis, yakni:

H3: Proporsi keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

5. HUBUNGAN KEBERADAAN KOMITE AUDIT DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Terbentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari terbentuknya *corporate governance* yang baik. Sejak terjadinya krisis yang melanda dunia dan juga melanda Indonesia banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kinerja finansial dan nonfinansial yang buruk. Pembentukan komite audit merupakan salah satu wujud untuk memperbaiki kinerja internal perusahaan, komite audit yang efektif adalah sebagai alat untuk meningkatkan keefektifan, tanggung jawab, keterbukaan dan obyektifitas dewan komisaris (FCGI, 2002).

Fungsi yang diemban oleh komite audit menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki mutu penyusunan laporan keuangan dengan review atas laporan keuangan secara efektif atas nama dewan komisaris.
- b) Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan.
- c) Memungkinkan anggota noneksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif
- d) Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan kepada direktur keuangan untuk mengemukakan pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan.
- e) Memperkuat posisi auditor eksternal dengan menciptakan suatu saluran komunikasi yang efektif untuk dapat mengemukakan pokok-pokok persoalan yang penting secara efektif.
- f) Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
- g) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya internal kontrol yang lebih baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pihak pembuat regulasi di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan seperti: Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM2000 merekomendasi perusahaan publik agar memiliki komite audit. Peraturan Bursa Efek Jakarta, KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.

Menurut Price Waterhouse (1980) seperti dikutip oleh McMullen (1996), mengemukakan bahwa pihak analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan sehingga mengurangi pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, mengurangi kecurangan dan tindakan ilegal. Hasil penelitian Klien (2002), menunjukkan bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Keberadaan

komite audit dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan adanya internal kontrol yang lebih baik karena salah satu tugas komite audit terkait dengan perbaikan kualitas laporan keuangan yang akan disampaikan ke publik. Informasi yang disampaikan ke publik merupakan salah satu faktor penting bagi pihak luar untuk menilai kinerja perusahaan.

Dengan demikian keberadaan komite audit diduga dapat meningkatkan ketepatan waktu perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu mencerminkan kredibilitas kualitas informasi yang disampaikan dan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dari uraian tersebut dikembangkan sebuah hipotesis yakni:

H4: Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus untuk menguji mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan keberadaan komisaris independen dan komite audit.

2. Populasi dan Sampel

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan beberapa kriteria tertentu, yakni menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan, memiliki kepemilikan manajerial, institusional, dan memiliki komisaris independen. Ada 41 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini untuk periode pengamatan tahun 2012 s.d 2013.

3. Variabel Penelitian

Variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan tahunan tepat dalam waktu 90 hari diberi tanda 0
- b) Perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunan melewati batas waktu 90 hari diberi tanda negatif sesuai dengan jumlah keterlambatannya
- c) Perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan tahunan lebih awal dari batas waktu 90 hari diberi tanda + sesuai dengan jumlah kecepatan penyerahan laporan keuangan tersebut.

Variabel independen terdiri atas:

- a) Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen.
- b) Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi.
- c) Keberadaan komisaris independen diukur dengan proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan.

- d) Keberadaan komite audit diukur dengan *dummy variable* yakni 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit.

4. Metode Analisis

Pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda dengan model pengujian sebagai berikut:

$$\text{KETEPATAN WAKTU} = \alpha + \beta_1 \text{ KEP.MAN} + \beta_2 \text{ KEP.INS} + \beta_3 \text{ KOM.IND} + \beta_4 \text{ KOM.AUD} + \varepsilon$$

D. HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

Tabel 1
Deskripsi Hasil penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KETEPATAN	82	-26.0	7.0	-.246	4.548
KEP.MAN	82	.0001	.3182	5.67E-02	8.19303E-02
KEP.INS	82	.0564	.9728	.576949	.189740
KOM.IND	82	.0000	1.0000	.370920	.141117
KOM.AUD	82	.0	1.0	.656	.479
Valid N (listwise)	82				

Sebagaimana yang tampak pada tabel 1 di atas rata-rata keterlambatan penyerahan laporan keuangan adalah 0.246. Rata-rata kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,05674 dengan deviasi standard sebesar 0.0810303, hal ini berarti rata-rata kepemilikan manajerial hanya sekitar 5%. Rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 58%, sementara proporsi komisaris independen adalah sebesar 37,5, Komite audit sebesar 0.656 dengan deviasi standard sebesar 0.479.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dengan model penelitiannya adalah sebagai berikut:

$$\text{KETEPATAN WAKTU} = \alpha + \beta_1 \text{ KEP.MAN} + \beta_2 \text{ KEP.INS} + \beta_3 \text{ KOM.IND} + \beta_4 \text{ KOM.AUD} + \varepsilon$$

Keterangan:

- α β = konstan
- KEP. MAN = Kepemilikan manajerial
- KEP. INS = Kepemilikan Institusional
- KOM. IND = Komisaris Independen
- KOM. AUD = Komite Audit

Hasil pengujian dengan regresi berganda disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Regresi

	Unstandardize d Coefficients B	T	P- Value	F	P- Value	R ²	Adj R ²
(Constant)	-13,362	-	0,000	6,36	0,000	0,36	0,309
MOWN	24,056	4,585	0,001*	3		6	
INSOWN	15,183	3,431	0,000*				
INDCOM	4,200	5,149	0,281				
AUDCOM	1,898	1,088	0,078				
		1,795					

* Secara statistis signifikan pada $\alpha=0,05$

Pengujian hipotesis 1 adalah untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dari hasil pengujian regresi seperti yang telah dipaparkan pada tabel 2 di atas terlihat *p-value* sebesar 0,001 yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha= 0,05$ dengan koefisien regresi yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang dinyatakan dalam teori keagenan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer mampu mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dengan dimilikinya saham oleh manajer maka diharapkan terjadi keselarasan kepentingan antara agen dan prinsipal yang secara alamiah selalu memiliki kepentingan yang berbeda yakni ingin memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing.

Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer maka mereka akan bekerja keras untuk mencapai kinerja yang optimal dan apabila hal tersebut dicapai maka kinerja yang baik merupakan suatu berita baik (*good news*) sehingga tidak ada alasan bagi pihak manajemen untuk menunda penyampaian laporan keuangannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Palmon dan Givoly (1982) salah satu alasan perusahaan untuk menunda penyerahan laporan keuangannya adalah karena perusahaan mengalami berita buruk (*bad news*).

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga terdukung dilihat dari nilai *p-value* yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha= 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ang (1977) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak luar mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen untuk menyampaikan informasi laporan keuangan tepat waktu atau lebih segera. Hasil penelitian ini juga mendukung *efficient monitoring hypothesis* yang dikembangkan oleh

Pound (1988) yang menyatakan bahwa pemegang saham institusional lebih profesional dari pemegang saham biasa sehingga kos monitoring perusahaan akan lebih rendah dan lebih efektif. Semakin besar kepemilikan institusional maka dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih cepat untuk menghindari berkurangnya relevansi dari laporan tersebut. Hal ini dikarenakan monitoring yang dilakukan oleh pihak institusi lebih efektif karena institusi mempunyai sumber daya dan kemampuan yang besar untuk melakukannya.

Hasil pengujian terhadap hipotesis 3 yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian secara statistis, terlihat dari *p-value* komisaris independen sebesar 0,281 yang berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini tidak berhasil menolak hipotesis null.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung pendapat Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada dewan komisaris maka semakin efektif peranan komisaris independen dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap perilaku oportunistik manajemen.

Hal ini bisa disebabkan oleh proporsi dewan komisaris yang rata-rata hanya sekitar 37 persen, dalam penelitian ini, angka tersebut hanya memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya proporsi komisaris independen adalah 30 persen. Secara absolut jumlah komisaris independen tersebut tidak cukup kuat untuk melakukan fungsi monitoring yang efektif sehingga tidak mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen.

Hipotesis 4 adalah menguji apakah perusahaan yang memiliki komite audit akan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Dari hasil pengujian secara statistis yang ditunjukkan dengan nilai *t* sebesar 1,795 dengan *p-value* sebesar 0,078. Dari angka *p-value* tersebut secara statistis komite audit dikatakan belum berpengaruh signifikan karena *p-value* nya berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini mungkin karena keefektifan keberadaan komite audit masih terdapat kontroversi, seperti yang dikemukakan oleh Wallace (1985) dan Knapp (1987) dalam Mc Mullen (1996) yang mengkritik tentang keberadaan komite audit karena menganggap komite audit adalah buatan manajemen sehingga diyakini oleh mereka sebagai pihak yang patuh kepada manajemen perusahaan ketimbang sebagai pengawas seperti yang diinginkan oleh pemegang saham.

Hasil penelitian ini belum dapat memberikan bukti empiris bahwa keberadaan komite audit cukup efektif dalam hal meningkatkan ketepatan waktu bagi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Fungsi yang diemban oleh komite audit yakni sebagai pihak yang berperan membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab yang berhubungan dengan masalah kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan belum mampu mendorong pihak manajemen untuk menyerahkan laporan keuangan lebih tepat waktu.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keberadaan komisaris independen dan komite audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara statistis berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tetapi proporsi keberadaan komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berhasil menolak hipotesis nol karena secara statistis tidak berpengaruh dilihat dari nilai p-value di atas $\alpha=0.05$.

Penelitian ini mendukung pendapat Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang maksimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka pihak manajemen diharapkan bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya guna memperoleh profit dan kinerja yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, Robert. 1997. *The Intelligent to Indonesian Capital Market*, 1st Edition. Mediasoft Indonesia.
- Beasley, M., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition, *Working Paper*, University of Rochester, Penn State.
- Chiang, Hsiang-tsai. 2005. An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance. *The Journal of American Academy of Busness*, Cambridge. March 95-101.
- Chtourou, S.M., Bedard, Jean, & Courteau, Lucie., 2001. Corporate Governance and Earnings Management. *Working Paper*, University Laval, Canada.
- Courtis, J.K, 1976. Relationship between timeliness in Corporate Reporting and Corporate Attributes. *Accounting and Business Research*, Vol. 6, Winter: p.45-56
- Dahya. J., McConnell, J.J. and Travlos, N.G.2002. The Cadbury Committee, Corporate Performance, and top Management turnover. *The Journal of Finance*. 57(1): 461-483.999
- Dyer, J.CIV and A.J.McHugh,1975. the Timeliness of The Australian Annual Report. *Journal of Accounting Research*; Autumn:.p. 204-219.
- Fama, E. dan M. Jensen,1983. Separation of Ownership and Control, *Journal of Political Economy* 88: 288-308.
- FASB, 1978. *Statement of Financial Accounting Concept No.1*, " Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises", Stamford, Connecticut.
- FCGI, 2002. *Pedoman Komite Audit Yang Efektif*.
- Givoly, D., and D.Palmon,1982. Timeliness of Annual Earning Announcement: Some Empirical Evidence. *The Accouting Review* 57: July:486-508.

- Jensen, M, and W.Meckling,1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*: 305-360.
- Klien, A, 2002. Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management, *Journal Accounting & Economics* (33), p. 375-400.
- Mc. Mullen, D.A., 1996. Audit Committee Performance: An Investigation of Consequences Associated with Audit Committees, *Auditing, A Journal of Practice and Theory*, Vol.14, No.1, p. 88-103.
- Owusu, Stephen & Ansah, 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market: Empirical Evidence Fram The Zimbabwe Stock Exchange. *Journal Accounting and Business*. Vol.30.p.241.
- Saleh, Rachmad, 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*:p 897-910.
- Schwartz, Kenneth B., & Billy S. Soo, 1996, The Association Between Auditor Change and Reporting Lags, *Contemporary Accounting Research*, Vol 13.
- Tong, Shenghui and Yixi Ning, 2004. Does Capital Structur Affect Institutional Investor Choices?. *The Journal of Investing*. Winter.p. 53